

## **Indonesia harus memberi contoh dalam menjaga hak digital menjelang pemilu, kata anggota parlemen Asia Tenggara**

JAKARTA — Sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan, Indonesia harus menjadi pemimpin dalam penegakan hak asasi manusia secara online, terutama menjelang pemilihan umum 2024 mendatang, kata anggota parlemen Asia Tenggara hari ini di akhir misi pencarian fakta tentang kebebasan internet di negara tersebut.

“Indonesia telah mengambil langkah besar dalam demokrasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru 25 tahun lalu, tetapi kami khawatir jika tren pembatasan kebebasan berbicara dan berekspresi dalam ruang digital saat ini terus berlanjut, maka kemajuan tersebut akan hilang,” kata Anggota APHR dan Anggota Parlemen Malaysia, Yuneswaran Ramaraj hari ini.

“Saat ini, internet telah menjadi salah satu tempat di mana warga negara dan pemilih paling banyak menggunakan hak kebebasan berbicara mereka; jika ruang digital ini ditutup, ini berisiko terhadap kebebasan dan keadilan pemilu mendatang,” lanjut Ramaraj.

Selama misi pencarian fakta, anggota dan mantan anggota parlemen dari Malaysia, Filipina, dan Timor-Leste mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan perusahaan teknologi serta melakukan kunjungan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Misi tersebut berujung pada pertemuan dengan anggota Komisi I DPR RI yang membidangi komunikasi dan informasi.

Salah satu temuan utama dari misi tersebut adalah bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - khususnya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik - telah digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk mengkriminalisasi dan membungkam ekspresi pendapat secara damai. Hal ini terlihat dari proses penuntutan yang dilakukan terhadap pembela HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, yang dilaporkan berdasarkan UU ITE oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan hanya karena membahas tuduhan keterlibatan menteri tersebut dalam kegiatan pertambangan di Papua di sebuah video Youtube.

“Pasal-pasal karet dalam UU ITE jelas-jelas telah disalahgunakan dan menimbulkan ancaman besar bagi diskusi yang bermakna tentang opini politik secara daring. Ini sangat mengkhawatirkan, khususnya dengan pemilihan umum di depan mata,” kata anggota APHR dan anggota parlemen Timor-Leste, Elvina Sousa Carvalho.

“APHR bergabung dengan masyarakat sipil Indonesia untuk menyerukan kepada pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk memberlakukan revisi undang-undang yang komprehensif, dan agar pihak berwenang menghentikan penggunaan undang-undang

tersebut sambil menunggu proses revisi. Penuntutan lanjutan di bawah UU ITE akan menimbulkan pertanyaan apakah pemilu mendatang benar-benar demokratis,” lanjut Carvalho.

Perwakilan dari masyarakat sipil dan media juga mengungkapkan keprihatinan mereka tentang peningkatan pemantauan konten media sosial, serta serangan digital terhadap pembela hak asasi manusia dan organisasi media. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi online ini telah menimbulkan efek yang mengerikan, menciptakan suasana di mana pengguna internet cenderung menyensor diri sendiri untuk menghindari pelecehan hukum atau intimidasi online.

Organisasi masyarakat sipil maupun Komnas HAM telah melakukan upaya untuk menjaga ekosistem digital yang demokratis, antara lain dengan pengecekan fakta disinformasi tentang Pemilu 2024, melakukan pelatihan bagi pemilih muda, serta melakukan pendekatan dengan aktor negara. Namun, banyak responden yang menyatakan keprihatinan bahwa lembaga negara tidak membuka ruang yang cukup bagi masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia untuk memberikan masukan mereka dalam regulasi yang memengaruhi kebebasan berbicara dan berekspresi secara online.

“Pemilu bukan hanya tentang apa yang terjadi pada satu hari di bilik suara,” kata anggota APHR dan mantan anggota parlemen Filipina, Sarah Jane Elago. “Pemilu harus menjadi proses yang benar-benar demokratis di mana semua anggota masyarakat merasa nyaman untuk mengekspresikan pandangan mereka secara damai dan melakukan dialog yang bermakna tentang masa depan negara.”

“Oleh karena itu, APHR mengimbau lembaga pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan terkait kebebasan digital dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memantau aktivitas online selama proses pemilu. Kami juga mendesak lembaga-lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, dan Komnas HAM untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan mencegah kemunduran dalam kemajuan demokrasi,” lanjut Elago.

“Indonesia sering dianggap sebagai salah satu negara paling demokratis dan menghormati hak asasi manusia di Asia Tenggara. Mempertimbangkan hal ini, dan posisinya sebagai ketua ASEAN, Indonesia harus terus memberi contoh dan tidak mundur dari kemajuan yang telah dicapai selama tiga dekade terakhir,” kata Ramaraj.

Untuk informasi lebih lanjut: *Karina Maharani T.* at [karina@aseanmp.org](mailto:karina@aseanmp.org) or +6281510076613.



**ASEAN PARLIAMENTARIANS  
FOR HUMAN RIGHTS**